

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang berperan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional (Erlangga, 2019). Jasa konstruksi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya harus didukung oleh keandalan, struktur usaha kokoh dan hasil pekerjaan yang berkualitas (Muhammad, 2020). Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kegiatan tersebut diperlukan sarana yang memadai, salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa (Wibowo, 2022).

Menurut Perpres Nomor 4 tahun 2015, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian, satuan atau lembaga kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam dunia Pendidikan, mekanisme pengadaan barang/jasa di sekolah diatur dalam Permendikbud No.18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Pendidikan. Sekolah mendapatkan kewenangan mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa pengadaan berbagai keperluan yang dibutuhkan, mengikuti proses pengadaan barang dan jasa sesuai metoda dan prosedur yang berlaku dengan menerapkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Dalam dunia pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang sedang melakukan pembangunan dan perbaikan terhadap fasilitas dan sarana sekolah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). SMK Pusat Keunggulan merupakan program SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyesuaian dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan akhirnya menjadi

SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya (Kemendikbud, 2021).

Di wilayah DKI Jakarta, terdapat 57 (lima puluh tujuh) sekolah terdiri dari 36 (tiga puluh enam) SMK Negeri dan 21 (dua puluh satu) SMK Swasta yang terdaftar dalam program SMK PK. Pemilihan sekolah tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan skema reguler, skema reguler lanjutan, pemadanan dukungan, dan pemadanan dukungan lanjutan. Semua sekolah yang telah terdaftar dalam program SMK akan diberikan bantuan dana yang nantinya dipergunakan untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasana yang menunjang kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tidak hanya kegiatan fisik, sekolah juga diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan praktik siswa serta pembelajaran.

Sebagai salah satu sekolah perintis dan sekolah yang mengutamakan peningkatan sarana dan prasarana, maka pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konstruksi sangat penting untuk meningkatkan kualitas kenyamanan dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konstruksi, pemilihan jenis pengadaan jasa yang tepat akan memudahkan dalam proses pengadaan jasa pada tahap selanjutnya.

Sesuai petunjuk dalam Permendikbud, pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Satuan Pendidikan terdiri atas Pelaksana dan Penyedia. Pelaksana PBJ pada satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah. Jika dibutuhkan, Kepala Sekolah dapat menunjuk Pendidik atau Tenaga Kependidikan secara perorangan atau Kelompok Kerja untuk melaksanakan PBJ di sekolah. Pemilihan jenis pengadaan jasa yang tepat akan memudahkan dalam proses pengadaan jasa pada tahap selanjutnya. Kecermatan para pengambil keputusan dalam memilih jenis pengadaan akan berdampak pada cepatnya capaian kegiatan. Jika dalam perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan dengan cermat dan sesuai akan menghasilkan produk yang diharapkan sesuai dengan target dan tujuan dari SMK PK yaitu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi lebih dan siap berusaha.

Salah satu contoh Sekolah Menengah Pusat Keunggulan yang menghasilkan produk siswa sesuai dengan tujuan SMK yaitu SMKN 3 Sukabumi. Dimana pada program kerjasama antara sekolah dengan pihak Bogasari dapat menghasilkan

omzet sebesar Rp. 339.260.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh rupiah) dalam kegiatan produksi kue kering TEFA *Cullinary*. Keberhasilan tersebut berawal dari adanya pelatihan yang diadakan di sekolah yaitu di Ruang Praktik Siswa (RPS) yang baru saja selesai dan digunakan untuk kegiatan pelatihan oleh pihak Bogasari.



Gambar 1.1 Pelatihan oleh Bogasari di Ruang RPS SMKN 3 Sukabumi.
Sumber: Dokumen Pribadi.

Sebaliknya, jika dalam perencanaan jenis pengadaan jasa terdapat kekeliruan atau kurang cermatnya dalam menentukan kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia maka imbasnya akan terasa pada terhambatnya pelaksanaan capaian kegiatan dan mengakibatkan hasil pekerjaan berakhir tidak maksimal. Kegagalan yang sering terjadi disini diakibatkan oleh faktor risiko yang tidak diantisipasi dari awal, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian yang terbilang masih kurang maksimal dan kurang ketat pelaksanaannya (Chasanah & Sulistyowati, 2017).

Salah satu contoh bentuk kegagalan dalam pengadaan jasa konstruksi yaitu pada salah satu sekolah yang berada di wilayah Jakarta pada tahun 2020 silam. Kegagalan tersebut diakibatkan karena konstruksi dan material yang digunakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan PBI 71 sebagai Syarat Pelaksanaan Dalam Konstruksi Beton atau adanya dugaan terdapat spesifikasi bahan yang kualitasnya diturunkan sehingga bangunan yang berdiri pun roboh. Dilansir melalui berita yang tersebar melalui media sosial, pada pelaksanaannya, pihak penyedia jasa konstruksi pada sekolah tersebut menggunakan besi material

yang tidak sebanding dengan bangunan sekolah yang sehingga mengakibatkan bangunan roboh serta terjadi kecelakaan pekerja.

Permasalahan lain dalam bentuk kegagalan dalam pengadaan jasa konstruksi yaitu di sekolah SMK Negeri Jakarta Timur pada tahun 2021 silam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, dalam praktiknya seringkali terjadi kesenjangan atau perbedaan pada komponen pekerjaan yang telah direncanakan dengan eksekusi serta hasilnya. Tidak hanya itu, komponen atau item pekerjaan yang tidak terdapat pada sistem Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pada pelaksanaannya dikerjakan oleh pihak penyedia dengan biaya yang tidak terdapat pada anggaran RKAS. Hal ini membuat baik pengguna jasa atau pihak sekolah dan pihak penyedia kerap merasa tidak sesuai dan menimbulkan kerugian meskipun tidak signifikan.

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut, menjadi contoh bahwa dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di sekolah tersebut masih belum memiliki kesesuaian yang mengacu pada acuan pekerjaan dengan pelaksanaannya. Pengendalian serta pelaksanaan serta pengawasan tidak dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan perencanaan sehingga mengakibatkan sasaran dan tujuan yang direncanakan tidak maksimal serta menimbulkan kegagalan yang fatal.

Oleh karena itu, menjalankan pengadaan jasa konstruksi di sekolah SMK khususnya SMK PK perlu mengetahui prosedur pengadaan yang baik dan memegang prinsip etika pengadaan. Bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan jasa memegang peranan penting untuk menjamin terlaksananya pengadaan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan. Hal ini dikarenakan pengadaan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Begitu pula permasalahan yang dialami oleh salah satu sekolah yang telah menjadi sekolah Pusat Keunggulan yaitu SMKN 1 Sinjai di Kabupaten Sinjai pada tahun 2023 lalu. Permasalahan tersebut diakibatkan karena adanya kasus dugaan korupsi bantuan pemerintah untuk Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). Menurut berita yang dilansir melalui laman pedulibangsa.com, pihak

tim auditor, menjelaskan bantuan dari Kemendikbud melalui swakelola, sebesar kurang lebih Rp 2,1 Miliar, yang di dalamnya berupa program bimbingan teknis dan pengadaan baik bangunan maupun peralatan mengalami kerugian negara sebesar ratusan juta rupiah.

Selain itu, salah satu sekolah SMKN yang berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pun mengalami permasalahan terkait dengan pengadaan konstruksi, dimana sekolah tersebut merupakan sekolah dengan kategori Pusat Keunggulan yang mendapatkan bantuan dana sebesar 3,3 Miliar. Dilansir melalui berita yang beredar melalui media internet, pihak Kementrian telah menurunkan dana dalam dua tahap, pertama 70 persen dan tahap kedua adalah 30 persen. Setelah pembangunan selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh Kementrian, ditemukan pekerjaan pembangunan fisik yaitu redesain Ruang Praktikum siswa dinyatakan tidak layak pakai dan gagal konstruksi. Permasalahan yang timbul dan masih belum teratasi tersebut di pengaruhi oleh sumber daya manusia dengan tidak adanya pihak yang terlibat untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi di sekolah. Pada kenyataan di lapangan, pihak yang bertugas dalam menangani pengadaan jasa memberikan keluasaan seutuhnya kepada pihak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dan administrasi.

Berdasarkan beberapa temuan masalah yang telah disebutkan, menjadi bahan awal pada penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini, yang akan dikaji adalah prosedur pelaksanaan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang berada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menunjang menunjang mata kuliah Manajemen Konstruksi, pada Capaian Pembelajaran, Mata Kuliah (CPMK) yang kedua yaitu Prinsip Manajemen.

Empat sekolah akan menjadi sasaran dalam penelitian ini, sekolah tersebut adalah SMK Negeri 6 Jakarta, 31 Jakarta, 36 Jakarta dan 58 Jakarta. Alasan pemilihan keempat sekolah tersebut karena (1) keempat sekolah tersebut berada di kota administratif yang sama yaitu di daerah DKI Jakarta; (2) keempat sekolah merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK); (3) memiliki anggaran bantuan dana yang cukup besar , dan (4) selama beberapa bulan terakhir sudah menganalisis fenomena pengadaan jasa konstruksi yang terjadi dan

sesuai dengan objek penelitian saat ini. Dengan beberapa alasan tersebut akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pembangunan di Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di DKI Jakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi agar dapat mencegah timbulnya risiko-risiko yang berdampak pada hasil pengadaan?
2. Apakah sistem pengelolaan, pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana jasa sudah berjalan dengan baik?
3. Apakah sekolah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan konstruksi?
4. Apakah pihak yang bertanggung jawab mengelola pengadaan barang/jasa sudah memahami proses pengadaan barang dan jasa di sekolah?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada prosedur dan metode pengadaan jasa konstruksi di sekolah,
2. Pemeriksaan kondisi fisik bangunan dilakukan secara visual.
3. Pada objek penelitian, dipilih empat sekolah Pusat Keunggulan yang berada di DKI Jakarta yaitu SMKN 6, SMKN 31, SMKN 36 dan SMKN 58,
4. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pembangunan di Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di DKI Jakarta?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pembangunan di Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Berikut manfaat dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan konsep baru dalam perkembangan ilmu pendidikan, pengetahuan dan teknologi dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi terkait kegiatan sistem pengadaan barang/jasa serta dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pihak- pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.